

# **PATOLOGI BIROKRASI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**Rina Martini, Nunik Retno**

**Dwi Purwandari**

**D2B 008 027**

**Dwipurwandari24@gmail.com**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

**Jln. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, 50239**

## **ABSTRAK**

Di Kabupaten Semarang Badan Kepegawaian Daerah menjadi sebuah instansi pemerintahan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan salah satu tugas pokoknya ialah penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi. Dengan tugas ini BKD menjadi “polisi” bagi PNS di seluruh Kabupaten Semarang. Akan tetapi dalam kenyataannya justru pegawai BKD masih banyak yang melakukan pelanggaran yang dewasa ini disebut patologi birokrasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara dan pengamatan/observasi langsung di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya patologi birokrasi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang. Selain itu banyaknya jenis-jenis patologi birokrasi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang. Upaya dalam menanggulangnya juga masih belum maksimal, baik itu upaya dari pemerintah daerah itu sendiri atau dari pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini dijelaskan jenis-jenis patologi yang terjadi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang. Sebagian besar jenis patologi yang terjadi diakibatkan birokrasi itu sendiri. Budaya birokrasi sejak jaman dahulu masih belum bisa dirubah oleh birokrasi itu sendiri. Dalam melakukan tugas sehari-seharinya banyak dari birokrasi yang belum maksimal dalam menjalankannya, terutama birokrasi yang berhubungan dengan pelayanan. Perubahan paradigma masih sangat diperlukan didalam birokrasi itu sendiri.

Upaya dalam mengurangi patologi birokrasi masih sedikit dan belum menyeluruh di instansi pemerintahan daerah. Upaya yang dilakukan masih terkesan setengah-setengah dan tidak ada keseriusan dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat untuk mengurangi patologi birokrasi ini. Namun, pada BKD Kabupaten Semarang sedikit masih melakukan upaya itu, yaitu dengan koordinasi antar anggota yang dilakukan setiap minggunya. Namun, hal ini masih jauh dari kata sempurna untuk mengurangi patologi birokrasi yang terjadi.

**Kata Kunci:** Birkiasi, Patologi Birokrasi, Upaya Mengurangi Patologi Birokrasi, Kendala Dalam Mengurangi Patologi Birokrasi.

## **ABSTRACT**

In Semarang District Regional Employment Board to be a very important government agency. This is because one of the tasks is organizing pokonya monitoring, evaluation, and reporting on the implementation of the tasks field of personnel, training and education that includes planning and employee development, education and training, and mutation. With this task BKD to "police" for civil servants throughout the Semarang District. But in reality it is still a lot of BKD employees who violate the adult is called a bureaucratic pathology. This study used quantitative research type descriptive analytic approach. Data collection techniques used in this study kuesiner, interviews and observation / direct observation in the field.

The results of this study indicate that the presence of pathology birorasi in Semarang District Personnel Board. Besides many other types of bureaucratic pathologies that exist in Semarang District Personnel Board. Efforts to mitigate them is still not maximized, both the efforts of the local government itself or from the central government.

In this study described the types of pathologies that occur in Semarang District Personnel Board. Most types of pathology that occurs due to the bureaucracy itself. Bureaucratic culture since antiquity still can not be changed by the bureaucracy itself. In doing errands a day much of the bureaucracy that is not maximized in the run, especially the bureaucracy associated with the service. Parigma changes still needed in the bureaucracy itself.

Efforts to reduce bureaucratic pathologies are still few and not comprehensive in local government agencies. Efforts are made still seem half-and lack of seriousness of the government, both national and local governments to reduce bureaucracy pathology. However, the Semarang District BKD fewer still that effort, with coordination between members is carried out every week. However, it is still far from perfect to reduce bureaucratic pathologies that occur.

**Keywords:** Birkiasi, Pathology Bureaucracy, Bureaucracy Effort Reduces Pathology, Pathology Constraints to Reduce Bureaucracy.

## **1. Pendahuluan**

Birokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan, permasalahan yang ada pun masih sama dari zaman dahulu. Saat ini pemerintah baik pusat maupun daerah menghabiskan lebih dari setengah anggarannya untuk birokrasi. Pengeluaran ini tidak diikuti dengan kinerja birorasi yang optimal. Sudah menjadi rahasia umum jika birokrasi menjadi penyakit dalam proses pemerintahan. Secara teoritis birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik.<sup>1</sup> Perlu diketahui hampir seluruh kegiatan pemerintahan dilakukan oleh para birokrat ini. Mulai dari urusan administrasi hingga pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi ditempatkan disetiap badan atau dinas yang mempunyai focus yang berbeda.

---

<sup>1</sup>Di unduh dari <http://itjen-depdagri.go.id/article-24-birokrasi.html> 20 Maret 2012 pukul 07:51

Dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, ada badan yang disebut dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah).BKD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi. Selain tugas pokok BKD juga memiliki fungsi, yaitu<sup>2</sup>:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi
2. Penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi
3. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi
4. Pelayanan umum bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi
7. Pengelolaan sekretariat Badan Kepegawaian Daerah
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan pengamatan di lapangan masih ada pegawai di BKD yang pada saat jam masuk kerja justru duduk-duduk di ruang tunggu dan bercerengkama, ada 4 bidang di BKD dan hanya ada pegawai di 1 bidang yang tidak melakukannya karena tugas yang ada di bidang tersebut memang lebih banyak dibandingkan bidang yang lain. Disini kita bisa melihat tidak efisiensinya jumlah pegawai dengan beban kerja yang harus ditanggung. Jumlah pegawai melebihi jumlah beban kerja yang ditanggung mengakibatkan banyak pegawai yang “menggurur” pada saat jam kerja.

Selain itu didapati juga pegawai yang pulang saat jam kerja dan kembali lagi pada saat jam pulang kerja untuk absen pulang. Absen yang digunakan sudah cukup efektif yaitu menggunakan absen sidik jari, namun masih ada celah pegawai untuk melakukan kecurangan salah satunya dengan pulang pada waktu jam kerja dan kembali pada waktu absen pulang. Hal ini menggambarkan ketidak produktifan seorang pegawai dan juga sabotase yang dilakukan oleh pegawai.

Proses patologi birokrasi yang akut di Indonesia ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi terpelihara sejak lama. Birokrasi sudah terbiasa menjadi symbol kemakmuran dan kerajaan

---

<sup>2</sup> Diunduh dari

[http://bkd.purworejokab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2&Itemid=3](http://bkd.purworejokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3) pada 16 Oktober 2012, pukul 08.21

bagi aparatnya untuk mendapat pelayanan dari masyarakat. Meskipun pemerintah sudah berusaha untuk mengurangnya dengan melakukan reformasi birokrasi, namun untuk mengubah paradig lama ini masih sangat sulit untuk dilakukan.

Berdasarkan fungsinya pada point 6 yaitu penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi. Jelas disini BKD sebagai monitoring dari PNS di seluruh SKPD kabupaten Semarang, akan tetapi patologi masih terjadi di badan yang seharusnya mengawasi SKPD diseluruh kabupaten. Hal ini membuat kinerja BKD patut dipertanyakan dalam evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi. Adanya peraturan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil tidak membuat PNS takut atau jera melakukan pelanggaran.

### **Tinjauan Pustaka**

Di Indonesia jika ada bahasan tentang birokrasi maka persepsi orang tidak lain adalah birokrasi pemerintah. Birokrasi dengan segala macam cacatnya menjadi milik pemerintah. Birokrasi pemerintah seringkali diartikan sebagai *officialdom* atau kerajaan pejabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang memiliki yuridiksi yang jelas dan pasti, mereka ada dalam area ofisial yang yurisdiktif. Di dalam yurisdiktif tersebut seseorang memiliki tugas dan tanggung jawab resmi (*official duties*) yang memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya. Mereka bekerja dalam tatanan pola hierarki sebagai perwujudan dari tingkat otoritas dan kekuasaannya. Mereka memperoleh gaji berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Selain itu dalam kerajaan pejabat tersebut proses komunikasinya didasarkan padadokumen tertulis (*the files*). Itulah kerajaan birokrasi yang rajanya para pejabat.<sup>3</sup>

Patologi birokrasi bisa diartikan sama dengan “penyakit birokrasi”. Peran birokrasi sebagai implementor dari kebijakan politik atau dengan kata lain birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, maka patologi birokrasi dapat diartikan sebagai persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan akibat kinerja birokrasi tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan publik dengan baik.<sup>4</sup>

Menurut Siagian dalam Syamsudin patologi birokrasi bisa dikelompokkan dalam lima kategori. Di antaranya adalah<sup>5</sup>:

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi.
2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional.
3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

<sup>3</sup>Prof.Dr.Miftah thoha, MPA.2002.*Birokrasi dan Politik di Indonesia*.Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada.hal 2

<sup>4</sup>Dr.HM.Ismail. MH, M.Si.2009.*Etika Birokrasi Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia*.Malang.Ash-Shiddiqy Press.Hal 129

<sup>5</sup>*ibid*

4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau ngatif
5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Diantara kelima kategori tersebut memiliki begitu banyak bentuk atau macam patologi birokrasi, sebagaimana terlihat dalam table berikut:<sup>6</sup>

## 6. Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik yakni penelitian yang dimaksud membuat analisis terhadap data kuantitatif secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Semarang tahun 2012.

Subjekutama dalam penelitian ini adalah birokrasi di BKD KAbupaten Semarang. Data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder data primer dikumpulkan oleh peneliti dari penyebaran kuseioner dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan dan data dari instansi terkait.

Dalam penelitian ini, data-data terkumpul akan disusun secara deskriptif kuantitatif dengan tahapan-tahapan analisis yaitu dengan cara menyeleksi data, pemeriksaan kelengkapan dan lesempurnaan data, serta kejelasan data, klasifikasi data, yaitu pengelompokkan data dan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya, mengadakan uji validitas dan reliabilitas pada angket yang telah disebar sebelumnya. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reabilitas menunjukkan adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu, data dimasukkan ke dalam *coding book* (buku koding) dan *coding sheet* (lembar koding), mentabulasikan data, yaitu menyajikan data dalam sebuah tabel (tabel induk, kemudian ketabel tunggal) sesuai tujuan analisis data, data yang ditabulasi dianalisis dengan koefisien korelasi *Rank Spearman*.

## 7. Pembahasan

Hasil penelitian patologi birokrasi di Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

### 7.1 Jenis – Jenis Patologi Birokrasi Yang Terjadi di BKD Kabupaten Semarang

Patologi birokrasi bisa diartikan sama dengan “penyakit birokrasi”. Peran birokrasi sebagai implementor dari kebijakan politik atau dengan kata lain birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, maka patologi birokrasi dapat diartikan sebagai persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan akibat kinerja birokrasi tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan public dengan baik.<sup>7</sup>

Patologi yan terjadi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang cukup mengkhawatirkan. Sebagai lembaga yang bertugas Penyelenggara monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang

<sup>6</sup>ibid

<sup>7</sup>Dr.HM.Ismail. MH, M.Si.2009.*Etika Birokrasi Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia*.Malang.Ash-Shiddiqy Press.Hal 129

meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi; dengan demikian BKD memonitor, mengevaluasi dan melaporkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kepegawaian di Kabupaten Semarang, namun pada kenyataannya BKD juga masih melakukan pelanggaran dan banyak diantara pegawai yang tidak tahu bahwa mereka melakukan patologi birokrasi.

Di lihat dari pengetahuan birokrasi mengenai patologi birokrasi, di BKD masih banyak pegawai yang belum mehami arti dari patologi birokrasi itu sendiri.

Dari 54 responden sebanyak 31 responden tidak mengetahui arti dari patologi birokrasi. Dari sisi birokrasi tidak mengetahui apa itu patologi birokrasi hal ini sangat menyedihkan. Pegawai melakukan patologi birokrasi dalam keseharian tanpa tahu bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah pelanggaran. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BKD dengan pertanyaan yang sama ini adalah jawabannya:

*“Patologi itu apa ya?(penyakit birokrasi pak) Penyakit birokrasi itu biasanya proses administrasi yang terlalu panjang sehingga tidak bisa maksimal, dan memang perlu ada standart pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada semua jajaran instansi pemerintah. Pelayanan masyarakat tidak bisa tepat dan maksimal.”(Wawancara dengan Budi Kristiono S.H, Tanggal 28 November 2012).*

Berdasarkan keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa kepala BKD masih belum mengerti definisi patologi birokrasi secara utuh. Pengetahuan mengenai patologi birokrasi penting bagi BKD karena badan ini yang menentukan seorang pegawai melakukan pelanggaran atau tidak.

Menurut Siagian dalam Syamsudin patologi birokrasi bisa dikelompokkan dalam lima katgeori. Di antaranya adalah<sup>8</sup>:

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi.
2. Patologi yang disebabkan kerena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional.
3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif
5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Dari pengelompokkan patologi diatas didapatkan banyak jenis patologi birokrasi antara lain sebagai berikut:

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi.  
Ada 8 jenis patologi birokrasi dalam kelompok ini antara lain:
  - a. Waktu Luang pada Saat Jam Kerja Berlangsung

---

<sup>8</sup>:ibid

- b. Ijin Keluar Kantor Pada Jam Kerja
  - c. Melakukan Sesuatu Tidak Sesuai Dengan Tugas/Wewenang
  - d. Bermasalah Dengan Rekan Kerja Sekantor
  - e. Kritik Yang Diberikan Oleh PNS SKPD Lain
  - f. Menerima Uang Dari PNS SKPD Lain
  - g. Mempermudah Pelayanan Dikarenakan Adanya Relasi
  - h. Menitipkan Relasi Untuk Menjadi PNS Di Kabupaten Semarang
2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional.  
Ada 5 jenis patologi birokrasi dalam kelompok ini antara lain:
- a. Instruksi Yang Diberikan Atasan
  - b. Kesalahan Dalam Menjalankan Instruksi Atasan
  - c. Diklat Yang Diikuti
  - d. Usulan Berkaitan Dengan Tugas/Wewenang
  - e. Usulan Tidak Berkaitan Dengan Tugas/Wewenang
3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku  
Ada 3 jenis patologi birokrasi dalam kelompok ini antara lain:
- a. Pelanggaran Yang Pernah Dilakukan
  - b. Menerima Uang dari PNS SKPD Lain untuk memperlancar pelayanan
  - c. Bekerja tidak sesuai dengan aturan
4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif  
Ada 6 jenis patologi birokrasi dalam kelompok ini antara lain:
- a. Menolak Melayani PNS SKPD Lain
  - b. PNS SKPD Lain Marah Karena Pelayanan
  - c. PNS SKPD Lain Kembali Berkali-Kali
  - d. Terlambat Masuk Kantor
  - e. Absen Pada Saat Masuk Dan Pulang Kantor
  - f. Membolos Apel Pagi
5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan  
Ada 6 jenis patologi birokrasi dalam kelompok ini antara lain:
- a. Misinformasi Antar Pegawai
  - b. Miskomunikasi Antar Pegawai

## **7.2 Usaha Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang Dalam Mengurangi Patologi Birokrasi**

Melihat patologi yang terjadi di Badan Kepegawaian Kabupaten Semarang (BKD), meskipun kepala BKD Kabupaten Semarang belum mengerti dengan benar apa itu patologi birokrasi masih ada usaha dari BKD Kabupaten Semarang untuk mengurangi patologi birokrasi yang terjadi.

Dalam pandangan birokrasi, tindakan indisipliner adalah tindakan yang harus dikurangi dan dimusnahkan. Ini juga anggapan dari Kepala BKD Kabupaten Semarang. Tindakan indisipliner

merupakan salah satu patologi birokrasi, sehingga upaya untuk menguranginya berarti pula ada upaya untuk mengurangi patologi birokrasi. Berikut upaya untuk menanggulangi patologi birokrasi:

1. Upaya mencegah keterlambatan masuk kantor
2. Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh atasan di BKD Kabupaten Semarang
3. Respon pegawai terhadap inspeksi mendadak yang dilakukan oleh atasan mereka.
4. Antisipasi yang dilakukan oleh pegawai BKD Kabupaten Semarang agar tidak melakukan pelanggaran
5. Upaya dalam menyelesaikan misinformasi
6. Upaya untuk menyelesaikan miskomunikasi yang terjadi

Perbedaan kepentingan yang terjadi di organisasi juga menjadi masalah yang mampu menimbulkan konflik besar di dalam organisasi itu sendiri. Penyelesaiannya juga akan melibatkan banyak pihak tidak hanya kedua belah pihak yang bersitegang dan kepala sebagai penengah saja. Di BKD Kabupaten Semarang perbedaan kepentingan juga tidak bisa dihindari, seperti dua kasus diatas penyelesaian mereka dalam mengatasi permasalahan intern cukup efektif. Pencarian jalan tengah tanpa melanggar aturan yang berlaku menjadi solusi terbaik jika ada perbedaan kepentingan didalam BKD Kabupaten Semarang.

### **7.3 Kendala dalam mengurangi patologi birokrasi**

Patologi birokrasi merupakan masalah yang mendasar yang terjadi di birokrasi Indonesia. Dalam pemberantasannya sudah pasti ada kendala yang dihadapi. Dari jawaban kepala BKD Kabupaten Semarang mengenai patologi birokrasi, terlihat beliau masih belum mengerti betul definisi dari patologi birokrasi. Itu menjadi kendala pertama dalam upaya untuk mengurangi patologi birokrasi.

Kendala selanjutnya adalah kesadaran dari pegawai BKD Kabupaten Semarang itu sendiri. Dari potret yang peneliti lihat, masih banyak pegawai yang melanggar aturan dengan sadar seperti contoh ada seorang pegawai BKD Kabupaten Semarang yang selalu pulang kerumah sekitar pukul 11.00 dan baru kembali pukul 15.00 saat jam kerja akan berakhir hanya untuk absen.

Hal diatas disadari juga oleh kepala BKD Kabupaten Semarang, beliau menyatakan dalam wawancaranya bagaimana aturan yang ada sangat sulit diterapkan kepada pegawainya. Hal ini mengindikasikan bahwa birokrasi masih mau berubah untuk menjadi lebih baik. Mereka cenderung melakukan kebiasaan yang sudah ada sejak lama. Berikut adalah petikan wawancara dengan kepala BKD Kabupaten Semarang mengenai kendala yang dihadapi dalam penegakkan disiplin pegawai:

*“Kendalanya biasanya kita itu, untuk disiplin itu biasanya ini aturan-aturan yang belum jelas. Aturan-aturan itu diterapkan sulit sekali.”*

Pernyataan diatas menyebutkan bahwa aturan yang dibuat belum jelas. Ini menjadi kendala juga dalam mengurangi patologi birokrasi. Ketidak jelasan aturan ini mengindikasikan ketidak seriusan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengurangi patologi birokrasi. Belum adanya aturan yang jelas untuk diterapkan menjadi kesulitan utama dalam menegakkan disiplin PNS dimana disiplin PNS ini menjadi salah satu patologi birokrasi.



## DAFTAR PUSTAKA

Ismail.2009.*Etika Birokrasi Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia*.Malang : Ash-Shiddiqy Press

Thoha, Miftah. 2002.*Birokrasi dan Politik di Indonesia*.Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada

<http://itjen-depdagri.go.id/article-24-birokrasi.html> Diunduh pada 20 Maret 2012 Pukul 07:51

[http://bkd.purworejokab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2&Itemid=3](http://bkd.purworejokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3)

Diunduh pada 16 Oktober 2012, pukul 08.21